



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014 terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyajian informasi yang tersaji dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 ini, antara lain:

- A. Entitas Akuntansi
Kabupaten Wonosobo terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana program dan kegiatan selama tahun anggaran 2013 ,sedangkan yang merupakan entitas akuntansi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) SKPD adapun Satuan Perangkat Daerah yang bukan merupakan entitas akuntansi adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- B. Koreksi atas laporan keuangan.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 menggunakan cut off atas bukti setor yang mempengaruhi realisasi 2014 per tanggal 10 Februari 2015. Bukti setor yang dilakukan setelah tanggal tersebut diakui sebagai Penerimaan Lain – lain Tahun Anggaran 2014.
- C. Kegiatan – kegiatan yang telah dianggarkan dan tersedia dana pada TA 2014 namun belum dapat diselesaikan, dan dianggarkan kembali pada APBD TA 2015.

No	SKPD/Program/Kegiatan	Realisasi		Jumlah Akumulalasi Realisasi s/d Akhir Tahun 2014	Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	25.250.681.986,00	2.973.611.458,00	28.224.293.444,00	20.936.250.492,00
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	25.250.681.986,00	2.549.449.800,00	27.800.131.786,00	9.956.265.492,00
	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Untuk SD (Luncuran DAK 2013)	20.475.552.480,00	1.047.154.000,00	21.522.706.480,00	961.806.692,00
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Untuk SD (Luncuran DAK 2014)	-	-	-	3.166.358.800,00
	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Untuk SMP/SMPLB (Luncuran DAK 2013)	4.775.129.506,00	1.502.295.800,00	6.277.425.306,00	1.147.500.000,00
	4 Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (Luncuran DAK 2014)	-	-	-	867.000.000,00
	5 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bant.Prov) Luncuran 2014	-	-	-	1.070.000.000,00
	6 Pengadaan Meubelair Pengganti SD (Bant.Prov) Luncuran 2014	-	-	-	1.540.000.000,00
	7 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (Bant.Prov) Luncuran 2014	-	-	-	1.203.600.000,00
	Program Pendidikan Menengah	-	424.161.658,00	424.161.658,00	3.287.985.000,00
	1 Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMA (Luncuran DAK 2013)	-	9.281.500,00	9.281.500,00	610.685.000,00
	2 Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMK (Luncuran DAK 2013)	-	414.880.158,00	414.880.158,00	278.000.000,00
	3 Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMA (DAK 2014)	-	-	-	439.950.000,00
	4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (DAK 2014)	-	-	-	1.479.350.000,00
	5 Pembangunan Sarana dan Prasarana SMA/ SMK	-	-	-	480.000.000,00
	Program Pendidikan Non Formal	-	-	-	150.000.000,00
	1 Pelatihan Ketrampilan Kecakapan Hidup (Luncuran DAK 2014)	-	-	-	150.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	-	-	6.242.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

No	SKPD/Program/Kegiatan		Realisasi		Jumlah Akumulalasi Realisasi s/d Akhir Tahun 2014	Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014		
1	2		3	4	5	6
	1	Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Wonosobo (Luncuran DAK 2014)	-	-	-	5.000.000.000,00
	2	Penyempurnaan dan Pembangunan GOR Indoor (Luncuran 2014)	-	-	-	1.042.000.000,00
	3	Pembangunan GOR Sukoharjo (Luncuran DAK 2014)	-	-	-	200.000.000,00
	Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		-	-	-	1.300.000.000,00
	1	Pengadaan Tanah GOR Kabupaten Wonosobo (Luncuran DAK 2014)	-	-	-	1.000.000.000,00
	2	Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah (Luncuran DAK 2014)	-	-	-	300.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN		-	-	-	10.750.000.000,00
	Program Upaya Kesehatan		-	-	-	6.000.000.000,00
	1	Pengadaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan untuk Paru dan Jantung (DBCHT Luncuran 2014)	-	-	-	1.500.000.000,00
	2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan Fasilitas Kesehatan untuk Perawatan Penderita Penyakit Paru dan Jantung (DBCHT Luncuran 2014)	-	-	-	2.500.000.000,00
	3	Peningkatan Pembangunan Puskesmas Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo (Bantuan Provinsi Luncuran 2014)	-	-	-	2.000.000.000,00
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		-	-	-	2.000.000.000,00
	1	Pengadaan / Pemasangan Instalasi Pembuangan Air Limbah (Luncuran 2014)	-	-	-	2.000.000.000,00
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		-	-	-	2.750.000.000,00
	1	Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan PKD, Pustu dan Puskesmas (Luncuran 2014)	-	-	-	2.750.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		9.291.529.300,00	29.062.906.810,00	38.354.436.110,00	65.544.425.000,00
	Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan One Roof Building)		-	-	-	13.500.000.000,00
	1	Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan One Roof Building)	-	-	-	9.000.000.000,00
	2	Pembangunan Gedung Kawasan Heritage	-	-	-	4.500.000.000,00
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		9.291.529.300,00	19.237.850.700,00	28.529.380.000,00	25.617.000.000,00
	1	Pembangunan Jalan (Luncuran)	417.210.000,00	2.559.596.000,00	2.976.806.000,00	2.016.000.000,00
	2	Pembangunan Jembatan (Luncuran)	-	-	-	1.826.500.000,00
	3	Pembangunan / Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi Luncuran 2013)	8.871.699.800,00	16.077.780.700,00	24.949.480.500,00	10.580.000.000,00
	4	Pembangunan Jembatan (Bantuan Provinsi Luncuran 2013)	2.619.500,00	600.474.000,00	603.093.500,00	2.535.650.000,00
	5	Peningkatan Jalan (Luncuran 2014)	-	-	-	8.658.850.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		-	-	-	2.890.000.000,00
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Strategis	-	-	-	2.890.000.000,00
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		-	-	-	466.000.000,00
	1	Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi Se-Kabupaten Wonosobo (Luncuran 2014)	-	-	-	466.000.000,00
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah		-	-	-	50.000.000,00
	1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola Air Minum	-	-	-	50.000.000,00
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		-	9.825.056.110,00	9.825.056.110,00	16.738.000.000,00
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Bantuan Provinsi Luncuran 2013)	-	251.214.600,00	251.214.600,00	206.000.000,00
	2	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastruktur Pedesaan (Bantuan Provinsi Luncuran 2013)	-	9.573.841.510,00	9.573.841.510,00	1.278.500.000,00
	3	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Infrastruktur Pedesaan (Luncuran 2014)	-	-	-	2.720.500.000,00
	4	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastruktur Pedesaan (Luncuran 2014)	-	-	-	5.691.000.000,00
	5	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan	-	-	-	2.389.500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

No	SKPD/Program/Kegiatan		Realisasi		Jumlah Akumulalasi Realisasi s/d Akhir Tahun 2014	Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014		
1	2		3	4	5	6
		Lingkungan Infrastruktur Pedesaan (Luncuran 2013 dan 2014)				
	6	Pembangunan / Rehabilitasi Jembatan Infrastruktur Pedesaan (Luncuran 2014)	-	-	-	737.500.000,00
	7	Pembangunan / Rehabilitasi Senderan Infrastruktur Pedesaan (Luncuran 2014)	-	-	-	3.105.500.000,00
	8	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Irigasi Infrastruktur Pedesaan (Luncuran 2014)	-	-	-	346.500.000,00
	9	Pembangunan Srana Air Bersih Pedesaan (Luncuran 2014)	-	-	-	263.000.000,00
	Program Pengembangan Data / Informasi		-	-	-	292.000.000,00
	1	Penyusunan data Base Skema Jaringan Irigasi Kabupaten Wonosobo	-	-	-	157.000.000,00
	2	Pendataan Sarana Air Bersih di Kabupaten Wonosobo	-	-	-	135.000.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	-	2.469.675.000,00
	1	Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis Bidang Ke Cipta Karya	-	-	-	859.000.000,00
	2	Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis Bidang Bidang Ke Bina Marga	-	-	-	980.000.000,00
	3	Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis Bidang Pengairan	-	-	-	333.000.000,00
	4	Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis Bidang PKP	-	-	-	297.675.000,00
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		-	-	-	2.971.750.000,00
	1	Pembuatan Taman Kota (Luncuran 2014)	-	-	-	1.406.750.000,00
	2	Penyempurnaan Pembangunan Taman Blok Kota	-	-	-	1.565.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan		-	-	-	500.000.000,00
	1	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	-	-	-	500.000.000,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		-	-	-	50.000.000,00
	1	Pendataan Pengukuran Potensi Pertambangan	-	-	-	50.000.000,00
4	BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH		-	-	-	350.000.000,00
	Program Perencanaan Tata Ruang		-	-	-	150.000.000,00
	1	Masterplan Penataan Kota	-	-	-	150.000.000,00
	Program Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		-	-	-	200.000.000,00
	1	Perencanaan Grand Design Garden City Wonosobo	-	-	-	200.000.000,00
5	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		-	-	-	10.000.000,00
	Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi		-	-	-	10.000.000,00
	1	Fasilitasi Kegiatan CSR yang dialokasikan untuk Pengembangan Jasa Lingkungan	-	-	-	10.000.000,00
6	SEKRETARIAT DAERAH		-	-	-	4.106.375.000,00
	A	BAGIAN KESRA	-	-	-	356.375.000,00
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		-	-	-	336.375.000,00
	1	Fasilitasi Komda Lansia	-	-	-	336.375.000,00
	Program Peningkatan peran serta kepemudaan		-	-	-	20.000.000,00
	1	Fasilitasi Pemuda pelopor	-	-	-	10.000.000,00
	2	Pembuatan RAD (Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan)	-	-	-	10.000.000,00
	B	BAGIAN UMUM	-	-	-	3.750.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	-	-	3.750.000.000,00
	1	Penyelesaian Rehab Pendopo Kabupaten Wonosobo	-	-	-	2.250.000.000,00
	2	Pengadaan pakaian Olah Raga Pegawai Pemerintah Kab. Wonosobo	-	-	-	1.500.000.000,00
7	KECAMATAN MOJOTENGAH		-	-	-	911.800.000,00
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		-	-	-	911.800.000,00
	1	Pembangunan Senderan Dusun Saragaten Desa Sajapura Kec. Mojotengah	-	-	-	145.500.000,00
	2	Pembangunan Senderan dan Rehab Jalan Jawar - Wonokromo Kec.	-	-	-	194.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

No	SKPD/Program/Kegiatan		Realisasi		Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Akhir Tahun 2014	Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014		
1	2		3	4	5	6
		Mojotengah				
3		Betonisasi dan Senderan Jalan Lingkungan Dusun Larangan Onje, Desa Mojosari, Mojotengah	-	-	-	97.000.000,00
4		Pavingisasi halaman pondok pesantren rodhotut tholibin jawar, kec. Mojotengah	-	-	-	194.000.000,00
5		Betonisasi dan Drainase Jalan Lingkungan Dusun Lemiring Desa Mojosari, Kec. Mojotengah	-	-	-	140.650.000,00
6		Betonisasi Dusun Donomerto Desa Sojopuro, Kec. Mojotengah	-	-	-	140.650.000,00
JUMLAH			34.542.211.286,00	32.036.518.268,00	66.578.729.554,00	102.608.850.492,00

- D. Kapitalisasi Aset
- Berdasarkan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah dilakukan penyesuaian atas realisasi belanja modal maupun belanja pemeliharaan dengan mengacu pada peraturan bupati dimaksud. Mutasi yang ada telah dijelaskan dalam CALK Neraca.
- E. Kegiatan pada SKPD yang didanai dari Non APBD Kabupaten serta aset yang timbul dari kegiatan tersebut bukan merupakan aset daerah. Kemudian untuk kegiatan non APBD yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan dan dana Urusan Bersama adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN BELANJA	REALISASI			JUMLAH	REALISASI DIATAS/ (DIBAWAH ANGGARAN
			DEKON-SENTRASI	TUGAS PEMBANTUAN	URUSAN BERSAMA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	DINAS KESEHATAN	2.229.600.000,00	-	2.213.150.000,00	-	2.213.150.000,00	(16.450.000,00)
2	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	1.265.500.000,00	-	1.142.885.800,00	-	1.142.885.800,00	(122.614.200,00)
3	DINAS TENAGA KERJA & TRANS	525.520.000,00	-	524.489.400,00	-	524.489.400,00	(1.030.600,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.303.750.000,00	-	-	2.303.750.000,00	2.303.750.000,00	-
5	BAPERMASDES	27.549.022.000,00	-	-	27.456.351.750,00	27.456.351.750,00	92.670.250,00)
6	RSUD SETJONEGORO	10.000.000.000,00	-	9.399.973.280,00	-	9.399.973.280,00	(600.026.720,00)
JUMLAH		43.873.392.000,00	-	13.280.498.480,00	29.760.101.750,00	43.040.600.230,00	(832.791.770,00)

- F. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2008.
- 1 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Jamkesmas di Puskesmas belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Guna menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 35 C/R/LHP/XVIII.SMG/06/2009 Tanggal 21 Juni 2009 yang merekomendasikan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Jamkesmas di Puskesmas Tahun Anggaran 2008 agar disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pendanaan program jamkesmas merupakan dana bantuan sosial dari departemen Kesehatan RI yang besarnya berdasarkan kapitasi sebesar Rp1.000,00 dikalikan jumlah penduduk miskin yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan dikalikan 12 bulan, dana tersebut langsung dikirim ke masing-masing Puskesmas yang jumlah alokasinya di tetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Dana yang telah ditransfer ke Puskesmas menjadi tanggungjawab penuh pimpinan puskesmas dan dipergunakan untuk kebutuhan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

pelayanan program Jamkesmas secara optimal, berikut daftar penerimaan dan penggunaan dana jamkesmas tahun anggaran 2008 :

1	Sisa Dana Tahun Anggaran 2007	1.369.318.365,00
2	Dana Jamkesmas TA 2008	2.344.757.000,00
	Jumlah dana yang ada TA 2008	3.714.075.365,00
3	Jumlah dana yang dipakai TA 2008	(2.299.476.498,00)
	Sisa Dana (3-4)	1.414.598.867,00

2 Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS).

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dasar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014 adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2014;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014, disebutkan bahwa Bantuan Operasioan Sekolah diberikan oleh pemerintah secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/ SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

a). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri.

Mekanisme pencairan dana BOS SD dan SMP Negeri adalah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memproses Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP Negeri 2014 di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah langsung ke rekening – rekening BOS sekolah penerima, berikut informasi tentang alokasi dan realisasi BOS SD/SMP Negeri tahun anggaran 2014 :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

No	Jenjang Sekolah	Jml Sekolah	Sisa dana TA 2013		Penerimaan TA 20 14	Realisasi Penggunaan	Sisa Dana TA 2014	
			Sisa karena jml murid tdk sesuai SK penetapan	Sisa dana yang belum digunakan			Sisa karena jml murid tdk sesuai SK penetapan	Sisa dana yang belum digunakan
1	SD	468	16.583.818	325.307.419	41.885.280.000	40.888.862.626	51.230.372	1.311.724.793
2	SMP	84	27.377.000	652.997.630	18.054.057.500	17.710.804.514	61.060.000	923.379.273
	Jumlah		43.960.818	968.305.049	59.939.337.500	58.599.667.140	112.290.372	2.235.104.066

Penjelasan sisa dana BOS tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Sisa kas karena jumlah murid tidak sesuai penetapan :
 - 1.1. SD sisa tahun anggaran 2013 sebesar Rp16.583.818,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Sisa masih di rekening sekolah Rp. 7.883.711,00
 - Digunakan untuk belanja tahun 2014 Rp. 8.700.107,00
 - 1.2. SMP sisa tahun anggaran 2013 sebesar Rp27.377.000,00 telah digunakan untuk belanja tahun 2014.
- b. Sisa dana BOS tahun anggaran 2013 yang belum digunakan adalah sisa kas atas BOS yang menjadi hak sekolah untuk SD sebesar Rp325.307.419,00 dan SMP sebesar Rp652.997.630,00

Penjelasan sisa dana BOS tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

- 1. Sisa kas karena jumlah murid tidak sesuai penetapan :
 - 1.1. SD sisa tahun anggaran 2014 sebesar Rp51.230.372,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Disetorkan ke kas negara Rp. 30.160.000,00
 - Sisa masih di rekening sekolah Rp. 8.890.372,00
 - Ditransfer ke sekolah lain Rp. 12.180.000,00
 - 1.2. SMP sisa tahun anggaran 2014 sebesar Rp61.060.000,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Disetorkan ke kas negara Rp. 17.040.000,00
 - Sisa masih di rekening sekolah Rp. 44.020.000,00
- 2. Sisa dana BOS tahun anggaran 2014 yang belum digunakan adalah sisa kas atas BOS yang menjadi hak sekolah untuk SD sebesar Rp1.311.724.793,00 dan SMP sebesar Rp923.379.273,00

- b). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK Negeri.
BOS SMA/SMK adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Dana BOS SMA/SMK digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia. Bantuan disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMA dan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung ke sekolah. Pelaksanaan program BOS SMA/SMK mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah, dengan mengutamakan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu dilaksanakan secara swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Berikut alokasi dan realisasi dana BOS kepada SMA/SMK Negeri tahun anggaran 2014:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

No	Jenjang Sekolah	Jml Sekolah	Sisa dana TA 2013		Penerimaan TA 20 14	Realisasi Penggunaan	Sisa Dana TA 2014	
			Sisa karena jml murid tdk sesuai SK penetapan	Sisa dana yang belum digunakan			Sisa karena jml murid tdk sesuai SK penetapan	Sisa dana yang belum digunakan
1	SMA	9	1.920.000	19.312	4.299.500.000	4.256.500.000	40.500.000	2.519.312
2	SMK	7	-	153.869	4.614.500.000	4.442.322.039	60.000.000	112.177.961
	Jumlah		1.920.000	173.181	8.914.000.000	8.698.822.039	100.500.000	114.697.273

Penjelasan sisa dana BOS tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Sisa kas karena jumlah murid tidak sesuai penetapan :
 - 1.1. SMA sisa tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.920.000,00 telah digunakan untuk belanja tahun 2014.
 - 1.2. SMK sisa tahun anggaran 2013 Nihil.
2. Sisa dana BOS tahun anggaran 2013 yang belum digunakan adalah sisa kas atas BOS yang menjadi hak sekolah untuk SMA sebesar Rp19.312,00 dan SMK sebesar Rp153.869,00

Penjelasan sisa dana BOS tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sisa kas karena jumlah murid tidak sesuai penetapan :
 - 1.1. SMA sisa tahun anggaran 2014 sebesar Rp40.500.000,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Disetorkan ke kas negara Rp. 36.500.000,00
 - Sisa masih di rekening sekolah Rp. 4.000.000,00
 - 1.2. SMK sisa tahun anggaran 2014 sebesar Rp60.000.000,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - Disetorkan ke kas negara Rp. 11.000.000,00
 - Sisa masih di rekening sekolah Rp. 49.000.000,00
2. Sisa dana BOS tahun anggaran 2014 yang belum digunakan adalah sisa kas atas BOS yang menjadi hak sekolah untuk SMA sebesar Rp2.519.312,00 dan SMK sebesar Rp112.177.961,00

G. Tindak Lanjut Hasil Reviu Tahun sebelumnya.

Terdapat beberapa rekomendasi hasil reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 yang belum selesai/ belum optimal:

- 1) Terdapat SP2D yang gagal cair sampai dengan 31 Desember 2013 atas kegiatan 21.39 Perencanaan Infrastruktur Vital strategis pada DPU rekening belanja 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan senilai Rp.34.904.400,00 yang masih tetap diminta pembayarannya oleh pihak ketiga sehingga dapat berdampak pada posisi hutang Daerah. *Atas permasalahan SP2D gagal cair, pada TA 2014 terjadi permasalahan yang sama bahkan meningkat.*
- 2) Permasalahan atas kegiatan rekonsiliasi pada DPPKAD Kabupaten Wonosobo dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 yang belum diselenggarakan secara sistematis dan terkoordinasi. *Pada penyusunan LKD TA 2014 proses rekonsiliasi masih belum sistematis dan terkoordinasi dengan baik.*
- 3) Prosedur penerimaan kas di bendahara penerimaan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat pada ketidakseragaman perlakuan di aplikasi SIPKD atas transaksi Bendahara Penerimaan, di mana entry data Tanda Bukti Penerimaan (TBP) tidak dilakukan oleh seluruh Bendahara Penerimaan, sehingga sulit diketahui posisi Kas di Bendahara Penerimaan. Dokumen tertulis atas penerimaan pendapatan di bendahara penerimaan juga sangat terbatas diperoleh. Transaksi pendapatan sebagian besar hanya dicatat berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dan transaksi hanya dapat diketahui setelah masuk ke Kas Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Tindak Lanjut hasil reviu tahun sebelumnya yang telah dilakukan :

- 1) Meskipun telah melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan telah menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan, namun pada beberapa SKPD belum menyelenggarakan administrasi persediaan secara tertib.
- 2) Pemungutan retribusi ijin trayek belum sesuai ketentuan khususnya dalam piutang retribusi dan pengenaan denda keterlambatannya.
- 3) Pengendalian penggunaan karcis dan benda berharga khususnya yang di petugas terminal, petugas parkir dan petugas pengujian kendaraan belum dikendalikan dan belum di opname persediaan secara teratur setiap bulannya.
- 4) Terdapat kelemahan pengendalian APBD atas kegiatan Pengadaan Alat Musik Bagi Paca Dan PSKS pada Dinas Sosial. Hal yang hampir serupa terjadi juga pada Dinas Kesehatan maupun RSUD Setjonegoro.
- 5) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terjadi kurang catat persediaan benda berharga seharusnya senilai Rp.1.015.264,00
- 6) Terjadi piutang pendapatan per 31 Desember 2013 dan belum dicatat sebagai piutang dalam Laporan Keuangan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Wonosobo
- 7) Terdapat belanja barang dan jasa pemeliharaan yang dibelanjakan barang aset belum dicatat sebagai aset pada neraca SKPD sebesar Rp.33.798.000,00
- 8) Pada Kantor Perpustakaan terdapat belanja modal pengadaan Komputer/PC berupa pembelian laptop senilai Rp.29.674.735,- yang disumbangkan ke Perpustakaan desa dan sudah dilengkapi dengan berita acara serah terima agar dijelaskan dalam CALK bahwa asset tersebut merupakan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan akan direklas ke asset tetap lainnya dan diajukan penghapusan untuk pencatatan tahun berikutnya.
- 9) Pada CALK Laporan Keuangan Badan Keluarga Berencana belum memberi penjelasan mengenai mutasi kredit dan debit asset.
- 10) Berdasarkan hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Kabupaten Wonosobo diketahui masih terdapat tanah makam pada Kelurahan Kaliwiro yang belum tercatat pada Neraca dan belum diketahui nilai bukunya.

H. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 telah dilaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural dilingkungan pemerintah kabupaten Wonosobo berdasarkan keputusan Bupati Nomor : 821.2/0055/BKD/2015 tanggal 16 April 2015 yang mendasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan struktur sebagai berikut:

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	URUSAN WAJIB	
1.01.	PENDIDIKAN	
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	SOTK Lama
1.01.02.	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	SOTK Baru
1.02.	KESEHATAN	
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	Kode dan nama SKPD tetap
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Kode dan nama SKPD tetap
1.03.	PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	SOTK Lama
1.03.02.	DINAS SUMBERDAYA AIR DAN BINA MARGA	SOTK Baru
1.03.03.	DINAS CIPTAKARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	SOTK Baru



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

1	2	3
1.04.	PERUMAHAN	
1.05.	PENATAAN RUANG	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kode dan nama SKPD tetap
1.07.	PERHUBUNGAN	
1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<i>SOTK Lama</i>
1.07.02.	KANTOR PERHUBUNGAN	SOTK Baru
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	
1.08.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>SOTK Lama</i>
1.08.02.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	SOTK Baru
1.09.	PERTANAHAN	
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<i>SOTK Lama</i>
1.10.02.	KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SOTK Baru
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	
1.12.01.	BADAN KELUARGA BERENCANA	<i>SOTK Lama</i>
1.12.02.	BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SOTK Baru
1.13.	SOSIAL	
1.13.01.	DINAS SOSIAL	<i>SOTK Lama</i>
1.14.	KETENAGAKERJAAN	
1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<i>SOTK Lama</i>
1.14.02.	KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SOTK Baru
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
1.15.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH	<i>SOTK Lama</i>
1.15.02.	KANTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	SOTK Baru
1.16.	PENANAMAN MODAL	
1.16.01.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	SOTK Baru
1.17.	KEBUDAYAAN	
1.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
1.19.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<i>SOTK Lama</i>
1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	<i>SOTK Lama</i>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

1	2	3
1.19.03.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SOTK Baru
1.19.04.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SOTK Baru
1.19.05.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SOTK Baru
1.20.	OTONOMI,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
1.20.00.	PPKD	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.01.	DPRD	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.05.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<i>SOTK Lama</i>
1.20.06.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>SOTK Lama</i>
1.20.07.	INSPEKTORAT KABUPATEN	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.08.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	<i>SOTK Lama</i>
1.20.09.	KECAMATAN WONOSOBO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.10.	KECAMATAN KERTEK	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.11.	KECAMATAN SELOMERTO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.12.	KECAMATAN LEKSONO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.13.	KECAMATAN WATUMALANG	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.14.	KECAMATAN MOJOTENGAH	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.15.	KECAMATAN GARUNG	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.16.	KECAMATAN KEJAJAR	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.17.	KECAMATAN KALIKAJAR	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.18.	KECAMATAN SAPURAN	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.19.	KECAMATAN KEPIL	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.20.	KECAMATAN KALIWIRO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.21.	KECAMATAN WADASLINTANG	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.22.	KECAMATAN SUKOHARJO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.23.	KECAMATAN KALIBAWANG	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.24.	KELURAHAN WONOSOBO BARAT	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.25.	KELURAHAN WONOSOBO TIMUR	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.26.	KELURAHAN JLAMPRANG	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.27.	KELURAHAN KEJIWAN	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.28.	KELURAHAN SAMBEK	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.29.	KELURAHAN MLIPAK	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.30.	KELURAHAN PAGERKUKUH	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.31.	KELURAHAN ROJOIMO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.32.	KELURAHAN KRAMATAN	Kode dan nama SKPD tetap



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

1	2	3
1.20.33.	KELURAHAN TAWANGSARI	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.34.	KELURAHAN JARAKSARI	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.35.	KELURAHAN BUMIRESO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.36.	KELURAHAN KALIANGET	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.37.	KELURAHAN KERTEK	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.38.	KELURAHAN WRINGINANOM	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.39.	KELURAHAN SELOMERTO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.40.	KELURAHAN WONOREJO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.41.	KELURAHAN LEKSONO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.42.	KELURAHAN WONOROTO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.43.	KELURAHAN KALIBEBER	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.44.	KELURAHAN MUDAL	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.45.	KELURAHAN ANDONGSILI	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.46.	KELURAHAN GARUNG	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.47.	KELURAHAN KEJAJAR	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.48.	KELURAHAN KALIKAJAR	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.49.	KELURAHAN SAPURAN	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.50.	KELURAHAN KEPIL	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.51.	KELURAHAN KALIWIRO	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.52.	KELURAHAN WADASLINTANG	Kode dan nama SKPD tetap
1.20.53.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	SOTK Baru
1.21.	KETAHANAN PANGAN	
1.21.01.	KANTOR KETAHANAN PANGAN	<i>SOTK Lama</i>
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SOTK Baru
1.22.02.	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<i>SOTK Lama</i>
1.23.	STATISTIK	
1.24.	KEARSIPAN	
1.24.01.	KANTOR ARSIP	SOTK Baru
1.24.02.	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	<i>SOTK Lama</i>
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.26.	PERPUSTAKAAN	
1.26.01.	KANTOR PERPUSTAKAAN	<i>SOTK Lama</i>
2.	URUSAN PILIHAN	
2.01.	PERTANIAN	
2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	<i>SOTK Lama</i>
2.01.02.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	<i>SOTK Lama</i>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 2014 dan 2013
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

1	2	3
2.01.03.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	SOTK Baru
2.02.	KEHUTANAN	
2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	<i>SOTK Lama</i>
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
2.04.	PARIWISATA	
2.04.01.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	<i>SOTK Lama</i>
2.04.02.	KANTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SOTK Baru
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.06.	PERDAGANGAN	
2.07.	INDUSTRI	
2.07.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<i>SOTK Lama</i>
2.07.02.	KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SOTK Baru
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	



BAB VII

P E N U T U P

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan serta merupakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode Tahun Anggaran 2014.

Demikian penjelasan secara singkat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, adapun penjelasan rinci disajikan pada format Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Sebagai penutup kiranya melalui penjelasan ini dapat membantu/memperlancar pembahasan, penelitian dan pengkajian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Wonosobo, Agustus 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H. A. KHOLIQ ARIF